

---

---

## Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Piutang Daerah di Kota Banjarbaru

Sriyunia Anizar<sup>1</sup>, Suzi Suzana<sup>2</sup>, Jakiroh<sup>3</sup>, Saiful Rahman<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Indonesia

Email; sriyunia.akbar90@gmail.com

---

### Abstrak

Kota Banjarbaru menjadikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), meskipun terdapat kendala berupa tingginya jumlah piutang PBB akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pengaruh signifikan Kesadaran, Sosialisasi, dan Insentif secara simultan terhadap Piutang Daerah PBB di Kota Banjarbaru. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pengaruh signifikan Kesadaran terhadap Piutang Daerah PBB, mengidentifikasi pengaruh signifikan Sosialisasi terhadap Piutang Daerah PBB, serta mengukur pengaruh signifikan Insentif terhadap Piutang Daerah PBB di Kota Banjarbaru. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui variabel yang paling dominan memengaruhi Piutang Daerah PBB di Kota Banjarbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian dilakukan terhadap 40 wajib pajak PBB di Kota Banjarbaru selama periode tiga bulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kesadaran, Sosialisasi, dan Insentif secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Piutang Daerah di Kota Banjarbaru. Namun, secara parsial, Kesadaran dan Sosialisasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan, sementara variabel Insentif berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Piutang Daerah. Variabel yang paling dominan memengaruhi Piutang Daerah adalah Insentif (X3). Nilai R Square sebesar 0,310 menunjukkan bahwa kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 23%, sedangkan 77% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

**Kata Kunci:** kesadaran, sosialisasi, insentif dan piutang

### Abstract

*The city of Banjarbaru has made the Land and Building Tax (PBB) one of the main sources of Regional Original Revenue (PAD), despite obstacles in the form of a high number of PBB receivables due to low taxpayer compliance. This study aims to evaluate and analyze the significant influence of Awareness, Socialization, and Incentives simultaneously on UN Regional Receivables in Banjarbaru City. In addition, this study also aims to examine the significant influence of Awareness on UN Regional Receivables, identify the significant influence of Socialization on UN Regional Receivables, and measure the significant influence of Incentives on UN Regional Receivables in the City of Banjarbaru. Another objective is to find out the most dominant variables affecting PBB Regional Receivables in Banjarbaru City. The method used in this study is multiple linear regression analysis. The study was conducted on 40 PBB taxpayers in Banjarbaru City over a three-month period. The results of the analysis show that the variables of Awareness, Socialization, and Incentives simultaneously have a significant influence on Regional Receivables in the City of Banjarbaru. However, partially, Awareness and Socialization did not show a significant influence, while the Incentive variable had a significant effect with a negative direction on Regional Receivables. The most dominant variable affecting Regional Receivables is Incentives (X3). The R Square value of 0.310 shows that the contribution of the independent variable to the bound variable is 23%, while the remaining 77% is influenced by other factors outside this study.*

**Keywords:** awareness, socialization, incentive and receivables

---

## PENDAHULUAN

Kota Banjarbaru merupakan daerah tingkat II Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki hak dalam melakukan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan, selain itu Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) utama yang terus ditingkatkan karena Kota Banjarbaru sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berasal dari Pajak dan Retribusi tidak seperti daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki sumber pajak dari pertambangan dan pertanian yang tidak dimiliki di Kota Banjarbaru sehingga Kota Banjarbaru terus berusaha memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama dari sektor itu Pajak Bumi dan Bangunan untuk pembangunan di Kota Banjarbaru (Arum & Zulaikha, 2012).

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, bahkan terus meningkatnya piutang PBB dari tahun ketahunnya, Kota Banjarbaru terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Landasan Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kecamatan Banjarbaru Selatan dan Kecamatan Cempaka. Dapat dilihat dimana dari tahun ke tahunnya jumlah SPPT dan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama mengalami peningkatan dari tahunnya jika mampu di maksimalkan maka setiap tahunnya Kota Banjarbaru akan terus mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari ketetapan yang terus meningkat diatas sisi positifnya adalah juga meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun di sisi lain juga akan meningkatnya piutang daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Saldo akhir piutang setiap tahunnya mengalami fluktuasi yaitu dari tahun 2020 Rp. 3,160,155,203,- meningkat menjadi Rp. 6,268,645,330 kemudian menurun menjadi Rp. 5,375,423,344, hal ini menandakan semakin banyaknya penunggakan yang dilakukan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru, walaupun sejak tahun 2022 melalui Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188 45/435/KUM/2022 tentang Pemberian Insentif Berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Pengurangan Pembayaran Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjarbaru.

Menurut Andriani & Lahaya, (2021) beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak meliputi minimnya sosialisasi perpajakan dari pemerintah kepada masyarakat, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, serta kualitas layanan yang diberikan oleh fiskus. Menurut Dianartini & Diatmika, (2021) menyatakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh sikap apatis wajib pajak serta keterbatasan pengetahuan mereka mengenai perpajakan.

Menurut Dewi, (2024), kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai sikap dari wajib pajak yang memiliki pemahaman menyeluruh, bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya, melaporkan seluruh penghasilannya secara jujur, dan tidak melakukan penghindaran pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di Kabupaten Landak, tingkat kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah, sehingga banyak dari mereka yang tidak mematuhi aturan perpajakan. Huda & Karsudjono, (2022) mendefinisikan sikap sebagai penilaian, perasaan, serta kecenderungan seseorang untuk menyukai atau tidak menyukai hal-hal dan gagasan tertentu. Sementara itu, Rahayu, (2020) menyebutkan

bahwa sikap wajib pajak mencakup pernyataan, pandangan, atau pertimbangan individu yang menjadi dasar perilaku mereka dalam berinteraksi dengan pihak lain atau dalam menghadapi suatu kejadian, baik yang bersifat menguntungkan maupun tidak, terhadap suatu objek tertentu.

Sosialisasi merupakan suatu proses di mana manusia, sejak lahir, memperoleh kemampuan untuk berfungsi sebagai individu sosial sekaligus menjadi bagian yang aktif dalam masyarakat (Dianawati Wijaya & Setyadi, 2019; Eko Listiwikono, 2022). Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia bersosialisasi dengan berpegang pada norma-norma yang berlaku. Menurut Juwita et al., (2020) norma adalah elemen independen yang membentuk struktur organisasi di setiap masyarakat. Norma ini hadir baik dalam kelompok masyarakat kecil maupun di dalam masyarakat modern yang lebih kompleks, seperti masyarakat industri.

Sosialisasi selama ini telah banyak dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai instansi yang membidangi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah banyak melakukan sosialisasi pada media baliho – baliho di Kecamatan dan Kelurahan serta media sosial, serta media masa lainnya namun masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya terutama pada media sosial yang harus lebih dilakukan secara intensif seperti melakukan give away dan postingan – postingan sosialisasi yang menarik hal ini terlihat dari media sosial instagram yang dimiliki Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang hanya memiliki pengikut sebanyak 1.153 (seribu seratus lima puluh tiga) pengikut atau hanya 1% dari jumlah SPPT untuk itu agar lebih efektif sosialisasi lebih banyak dilakukan pada media sosial kedepannya.

Selain Kesadaran dan Sosialisasi pemberian diskon, insentif atau Penghapusan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjarbaru sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru 2023 yang telah di tetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188 45/435/KUM/2022 tentang Pemberian Insentif Berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Pengurangan Pembayaran Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjarbaru menjadi langkah dari upaya pengurangan piutang atau tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjarbaru namun fenomena yang ada dilapangan beserta data piutang masih adanya tunggakan piutang yang terjadi walaupun mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya yaitu 2021, untuk itu Pemerintah Kota Banjarbaru agar lebih intensif lagi melakukan penagihan dengan memberikan diskon atau pengurangan yang telah di tetapkan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Penelitian terdahulu sebelumnya telah dilakukan oleh Aqwam, (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan selain itu juga penelitian dilakukan oleh Uchi Ardianti. 2022. Faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kabupaten jeneponto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, tingkat kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta Penelitian dilakukan oleh Ma'ruf & Supatminingsih, (2020) Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pertama, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. Kedua, tingkat pemahaman wajib pajak juga berdampak positif terhadap kepatuhan tersebut. Ketiga, penerapan sanksi menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan terkait tanah dan bangunan. Keempat, kualitas pelayanan turut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian Sari & Siswanto, (2022) Pengaruh administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, sanksi pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (studi kasus pada kecamatan kartoharjo kota madiun) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh administrasi perpajakan, pelayanan kepada wajib pajak, sanksi perpajakan dan perpajakan insentif terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan kepada wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan administrasi perpajakan dan perpajakan insentif tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saran pada penelitian selanjutnya adalah demikian perlu diadakan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak dan pemerintah membuat aplikasi mobile tersebut memuat informasi tentang pajak bumi dan bangunan, pemerintah bekerjasama dengan minimarket, pos atau virtual aplikasi pembayaran untuk membuka layanan pembayaran pajak bumi dan bangunan sehingga dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran, pemerintah menaikkan denda bagi wajib pajak yang melanggar agar lebih menimbulkan efek jera serta (Wardati et al., 2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kutai Kartanegara (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak

Dari penelitian terdahulu terutama variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan sehingga menjadikan peneliti untuk tidak meneliti variabel sanksi dan menggantikannya dengan variabel insentif pajak sesuai dengan Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188 45/435/KUM/2022 tentang Pemberian Insentif Berupa Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Pengurangan Pembayaran Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kota Banjarbaru dan variabel terikat mengembangkan dari kepatuhan wajib pajak menjadi penunggakan pajak atau piutang dikarenakan piutang PBB yang terus meningkat pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu Kesadaran, Sosialisasi dan Insentif Pajak yang mempengaruhi variabel terikat yaitu Piutang Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dari kesadaran selama ini dirasa masih rendah dan dilakukan masyarakat masih merasa dirugikan

membayar PBB seharusnya masyarakat sadar penerimaan PBB sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan digunakan untuk pembangunan, selain itu perlu sosialisasi yang aktif baik secara langsung maupun melalui media sosial serta sanksi pajak yang beberapa tahun terakhir sudah dilakukan pembebasan denda oleh Pemerintah Kota Banjarbaru sehingga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penekanan terhadap insentif sebagai variabel dominan yang memengaruhi kepatuhan pajak. Sementara penelitian sebelumnya lebih banyak mengeksplorasi kesadaran dan sosialisasi, penelitian ini mengintegrasikan peran insentif dalam konteks spesifik Kota Banjarbaru, didukung oleh data empiris dan analisis kebijakan lokal. Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk menangani penunggakan PBB dan meningkatkan ketahanan finansial kota. Seiring dengan pertumbuhan Kota Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi, kebijakan pajak yang efektif menjadi sangat penting untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak simultan Kesadaran, Sosialisasi, dan Insentif terhadap kepatuhan PBB, mengidentifikasi kontribusi individu dari setiap variabel terhadap tren piutang pajak yang diamati dan menentukan faktor dominan yang memengaruhi kepatuhan pajak di Kota Banjarbaru. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teoretis. Secara praktis, penelitian ini menawarkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi pajak yang lebih efektif, terutama di lingkungan perkotaan. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur tentang kepatuhan pajak dengan menyoroti interaksi antara kesadaran, sosialisasi, dan insentif dalam memengaruhi perilaku wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Populasi dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru yang memiliki piutang PBB, penentuan populasi didasarkan jumlah variabel sebanyak  $4 \times 10 = 40$  sehingga populasi penelitian sebanyak 40 (tiga puluh) tiga puluh Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru. Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini menggunakan regresi berganda maka sampel yang akan digunakan adalah variabel penelitian  $4 \times 10 = 40$  Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru, dengan kriteria sebagai berikut: Responden penelitian merupakan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru yang memiliki piutang PBB serta Responden Penelitian Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru yang tersebar pada 5 (lima) Kecamatan di Kota Banjarbaru.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

##### **1. Data Kualitatif**

Dalam penelitian ini data kualitatif yaitu data yang berbentuk verbal buka angka yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah Sejarah singkat berdirinya organisasi, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan gambaran keadaan objek penelitian

## **2. Data Kuantitatif**

Dalam penelitian ini data kuantitatif yang diperlukan adalah: Jumlah wajib pajak dan hasil kuesioner penelitian sebagai responden dalam penelitian yang akan digunakan sebagai data base perhitungan statistik.

### **b. Sumber Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber data primer, adalah data yang didapatkan langsung dari sumber pertama yaitu Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Cempaka sebagai reponden dalam penelitian yang akan mengumpulkan sumber data berupa jawaban kuesioner dan wawancara.
2. Sumber data sekunder, adalah data yang di dapat dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yaitu dapat tugas pokok, sejarah desa, jumlah penduduk, serta gambaran untuk menjelaskan pada latar belakang serta hasil penelitian dan pembahasan nantinya.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, Dilakukan peneliti dengan mencari artikel, jurnal dan buku terkait variabel dalam penelitian untuk mendukung bahan penelitian dalam pembuatan kuesioner dan analisa temuan penelitian yang dibandingkan dengan penelitian terdahulu dan teori digunakan nantinya.
2. Kuisisioner, Kesadaran, Sosialisasi dan Insentif dan Kepatuhan Wajib Pajak, kuesioner dibagikan kepada 99 (sembilan puluh sembilan) kuesioner penelitian yang menjadi Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Cempaka untuk mempercepat waktu penelitian kuesioner diberikan dengan online dengan google form melalui wa kepada masyarakat yang menggunakan pelayanan publik dan akan dikirimkan kuesioner via wa untuk diminta bantuan mengisi angket survey.
3. Obeservasi dilakukan dengan melihat hasil analisa dengan mebandingkan dengan teori dan temuan terdahulu.
4. Teknik dokumentasi  
Dokumentasi selain langsung ke lokasi penelitian juga melihat aktivitas perusahaan langsung ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru dan mengamati pada pelayanan publik pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru.
5. Wawancara  
Wawancara dilakukan dengan karyawan dan konsumen perusahaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru sebagai studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta hasil implikasi pembahasan nantinya.

## **Teknik Analisa Data**

### **1. Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang didalamnya terdapat sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh tanggapan dan informasi dari responden.

- a. Pengukuran Instrumen Penelitian
- b. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

#### **1) Uji Validitas Instrumen**

Koefisien validitas menggambarkan tingkat kemampuan instrumen untuk mengungkap data atau informasi dari variabel yang diukur. Teknik pengujian validitas menggunakan teknik korelasi product moment dari pearson dengan tingkat signifikansi 5% untuk mengetahui keeratan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan cara mengkorelasikan antara skor item pernyataan terhadap skor total. Apabila nilai total pearson correlation  $> 0,3$ , atau probabilitas kurang dari 0,05 maka item tersebut valid (Arikunto, 2016).

#### **2) Uji Reliabilitas Instrumen**

Teknik pengujian reliabilitas menggunakan koefisien alpha cronbach dengan taraf nyata 5%, Jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis atau jika nilai alpha cronbach lebih besar daripada 0,6 maka item tersebut dinyatakan reliabel. Koefisien alpha kurang dari 0,6 menunjukkan reliabilitas yang buruk, angka sekitar 0,7 menunjukkan reliabilitas dapat diterima dan angka di atas 0,8 menunjukkan reliabilitas yang baik.

### **2. Uji Asumsi Klasik**

Untuk menggunakan persamaan regresi berganda, diperlukan pemenuhan asumsi klasik agar menghasilkan estimasi yang tidak bias dan efisien (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE) berdasarkan metode kuadrat terkecil (Least Squares). Beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi meliputi:

#### **a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah variabel terikat dan variabel bebas, baik secara individu maupun bersama-sama, memiliki distribusi yang normal dalam sebuah model regresi. Normalitas dapat dideteksi melalui pola penyebaran data (titik-titik) pada grafik yang mengikuti sumbu diagonal. Dasar yang digunakan untuk pengambilan keputusan adalah:

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Identifikasi multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis nilai Variance Inflating Factor (VIF) dan Tolerance dalam regresi. Model regresi linier berganda dianggap bebas dari multikolinieritas jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,1.

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat perbedaan varian residual antar pengamatan dalam sebuah model regresi. Jika varian residualnya konsisten untuk setiap pengamatan, kondisi ini disebut homoskedastisitas. Sebaliknya, jika varian residualnya berbeda antar pengamatan, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Keberadaan gejala heteroskedastisitas dapat diketahui dengan mengamati pola pada grafik scatter plot. Jika tidak ditemukan pola yang spesifik atau titik-titik tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi.

### **3. Analisis Regresi Linier Berganda**

Penelitian ini memanfaatkan analisis inferensial untuk mengevaluasi pengaruh variabel Kesadaran, Sosialisasi, dan Insentif terhadap Piutang Daerah PBB serta untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Model analisis yang diterapkan adalah regresi linier berganda, dengan menggunakan perangkat lunak komputer SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 25.0 for Windows sebagai alat bantu.

#### **Pengujian Hipotesis**

##### **a. Uji Simultan (Uji Hipotesis I)**

Uji F merupakan metode untuk menguji koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen dalam model secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, Uji F digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh variabel Kesadaran, Sosialisasi, dan Insentif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, baik secara simultan maupun parsial.

##### **b. Uji Parsial (Uji Hipotesis I)**

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini bertujuan untuk mengukur signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya dianggap tetap atau tidak berubah.

##### **c. Uji Beta (Uji Hipotesis III)**

Dari variabel-variabel yang signifikan, dipilih variabel yang memiliki pengaruh dominan. Untuk menentukan besarnya kontribusi masing-masing variabel bebas serta variabel yang paling berperan dalam memengaruhi variabel terikat dalam model regresi linier, digunakan koefisien Beta (Beta Coefficient) dari setiap variabel yang telah distandarisasi (standardized coefficient). Variabel bebas dengan nilai beta ( $\beta$ ) tertinggi menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh paling dominan terhadap variabel terikat.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

Tabel 1. Hasil Output SPSS Regresi Linier Berganda

Model Summary						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	.480 <sup>a</sup>	.230	.166			
a. Predictors: (Constant), Insentif, Kesadaran, Sosialisasi						
ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120.644	3	40.215	3.593	.023 <sup>b</sup>
	Residual	402.956	36	11.193		
	Total	523.600	39			
a. Dependent Variable: Piutang Daerah						
b. Predictors: (Constant), Insentif, Kesadaran, Sosialisasi						
Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	t	
1	(Constant)	16.539	3.602		4.591	.000
	Kesadaran	.083	.201	.074	.415	.681
	Sosialisasi	.033	.340	.025	.096	.924
	Insentif	-.825	.386	-.534	-2.138	.039
a. Dependent Variable: Piutang Daerah						

Sumber: Data diolah

Nilai R Square pada tabel menunjukkan angka sebesar 0,230, yang mengindikasikan bahwa kontribusi seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 23%, sedangkan 77% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini. Berdasarkan hasil R<sup>2</sup> yang diperoleh dalam penelitian ini, karena mendekati angka 1, hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dapat dikategorikan dalam tingkat sedang. Semakin mendekati angka 1, nilai R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang semakin kuat untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sebaliknya, jika nilai R<sup>2</sup> mendekati 0, hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin lemah.

Berdasarkan tabel 4.13 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 16,539 + 0,083X_1 + 0,033X_2 - 0,825X_3 + e$$

Adapun penjelasan dari persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut :

1. Nilai Constanta sebesar 16,539 menunjukkan jika Kesadaran (X1), Sosialisasi (X2) dan Insentif (X3) dianggap konstan maka nilai Piutang Daerah (Y) 0,904
2. Jika koefisien variabel Kesadaran (X1) sebesar 0,083 meningkat satu dengan asumsi variabel Sosialisasi (X2) konstan dengan Insentif (X3) konstan, maka Piutang Daerah (Y) akan meningkat sebesar 0,083.
3. Jika koefisien variabel Sosialisasi (X2) sebesar 0,033 meningkat satu dengan asumsi variabel Kesadaran (X1) konstan dengan Insentif (X3) konstan, maka Piutang Daerah (Y) juga akan meningkat sebesar 0,033.
4. Jika koefisien variabel Insentif (X3) sebesar -0,825 meningkat satu dengan asumsi variabel Kesadaran (X1) konstan dengan Sosialisasi (X2) konstan, maka Piutang Daerah (Y) sebaliknya akan menjadi menurun sebesar -0,825.

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa variabel Kesadaran (X1) dan Sosialisasi (X2) memiliki koefisien regresi yang bersifat positif. Sementara itu, variabel Insentif (X3) menunjukkan koefisien regresi yang bersifat negatif, yang mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan arah dengan variabel terikat, yaitu Piutang Daerah (Y). Dengan kata lain, peningkatan pada variabel X1 dan X2 akan menyebabkan peningkatan pada variabel terikat Y, sedangkan peningkatan pada variabel X3 akan mengakibatkan penurunan pada variabel terikat Y.

### **Uji Hipotesis**

#### **Uji Hipotesis I: Uji F**

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program bantuan perhitungan statistik versi 25.0 yaitu sebagai berikut:

Dapat disimpulkan Kesadaran dan Sosialisasi berpengaruh secara simultan Terhadap Piutang Daerah karena nilai signifikansi  $0,023 < 0,05$  dan nilai F hitung  $3,593 > F$  tabel 2,87, dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Kesadaran, Sistem Sosialisasi dan Insentif berpengaruh secara simultan signifikan Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru adalah benar atau teruji.

#### **Uji Hipotesis II, III dan IV: Uji t**

Berdasarkan analisis statistik yang ditampilkan pada tabel 4.15, variabel Kesadaran (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,681 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung 0,415 yang lebih kecil dibandingkan nilai t tabel sebesar 2,023. Selain itu, variabel Sosialisasi (X2) juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan nilai signifikansi t sebesar 0,924 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai t hitung 0,096 yang lebih kecil dari t tabel 2,023. Sebaliknya, variabel Insentif (X3) memiliki pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. Hal ini dibuktikan melalui nilai signifikansi t sebesar 0,039 yang lebih kecil dari 0,05 dan nilai t hitung -2,138 yang lebih besar dari t tabel 2,023. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dan ketiga yang menyatakan Kesadaran dan Sosialisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Piutang Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru tidak terbukti. Sebaliknya, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Insentif berpengaruh signifikan negatif

terhadap Piutang Daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru terbukti benar.

#### **Uji Hipotesis V: Uji Dominan**

Berdasarkan tabel di atas, variabel Insentif (X2) terlihat sebagai variabel yang memiliki pengaruh dominan terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, karena nilai beta-nya yang paling besar, yaitu -0,534, dibandingkan dengan nilai beta dari variabel bebas lainnya. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Variabel Kesadaran memiliki pengaruh dominan terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru dinyatakan tidak benar atau tidak terbukti.

#### **Pembahasan**

##### **Variabel Kesadaran, Sosialisasi dan Insentif Berpengaruh Signifikan Secara Silmutan terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru**

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kesadaran dan Sosialisasi merupakan variabel yang berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, temuan penelitian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Awaloedin et al., (2020) Kesadaran wajib pajak merujuk pada niat baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak dengan penuh keikhlasan berdasarkan hati nurani. Semakin tinggi tingkat kesadaran tersebut, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan akan semakin baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Sosialisasi, di sisi lain, adalah proses pembelajaran norma, nilai, peran, serta berbagai syarat lain yang diperlukan untuk memungkinkan individu berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan social dan Menurut (Aprilia, 2021; Harini et al., 2020) Insentif pajak mengacu pada suatu bentuk dorongan yang diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan mendorong mereka agar lebih termotivasi untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kesadaran, Sosialisasi dan Insentif berpengaruh terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, Kesadaran dalam membayar pajak harus ada pada semua masyarakat di Kota Banjarbaru karena dengan pembayaran PBB akan menjadikan pembangunan Kota Banjarbaru juga terus meningkat serta piutang menjadi berkurang, selain itu juga perlunya sosialisasi dari Pemerintah Kota Banjarbaru khususnya Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan instansi yang menangani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Banjarbaru agar semua masyarakat mengetahui apa manfaat dan kewajiban masyarakat dari PBB sehingga piutang menjadi berkurang selain itu juga insentif yang tidak kalah penting harus diberikan setiap tahun bahkan ditingkankan dengan diberikan sehingga wajib pajak PBB yang sudah terlanjur memiliki piutang atau tetunggak diringankan pembayarannya karena adanya insentif pajak.

Berdasarkan hasil jawaban responden penelitian menjawab netral akan pertanyaan variabel piutang daerah yaitu anda melakukan penunggakan pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru dikarenakan kurangnya pengetahuan perpajakan, anda melakukan penunggakan pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru karena kurangnya kesadaran dan anda melakukan penunggakan pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru kurang patuh terhadap aturan perpajakan. Posisi penelitian mendukung Kesadaran, Sosialisasi dan Insentif merupakan variabel yang berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota

Banjarbaru karena nilai signifikan  $0,023 < 0,05$ . Variabel Kesadaran dan Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan secara Parsial terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sedangkan Insentif berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru

Hasil penelitian menunjukan bahwa Kesadaran dan Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. Masyarakat di Kota Banjarbaru umumnya sudah mengetahui apa PBB dan tujuan dari PBB sehingga semua masyarakat sudah mengetahuinya dan menyadarinya bahwa apa yang menjadi kewajibannya setiap tahun, namun tidak sampainya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang belum diberikan secara elektronik oleh Pemerintah Kota Banjarbaru selain itu kondisi ekonomi yang belum stabil di masyarakat sehingga membuat wajib pajak PBB melakukan penunggakan pajak yang membuat piutang PBB menjadi meningkat temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Menurut Ardiansyah, (2018) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil jawaban responden pada pengisian kuesioner penelitian untuk pertanyaan variable Kesadaran memberikan jawaban dengan nilai rata – rata setuju atas pertanyaan Pemerintah Daerah memberitahukan pembertahuan Pajak PPB-P2 berupa SPT pada bulan mei setiap tahunnya. Pelayanan Pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru memberikan pelayanan dengan baik. Anda memiliki kesadaran yang tinggi dan memahami manfaat membayar Pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru. Anda memiliki pengetahuan Pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru Tagihan Pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru sesuai kondisi ekonomi anda. Posisi penelitian mendukung Kesadaran tidak berpengaruh signifikan Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru karena nilai signifikan  $0,681 > 0,05$ .

Hasil penelitian menunjukan bahwa Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, Sosialisasi telah dilakukan dengan baik oleh Ketua RT, Kolektor, Kelurahan dan Kecamatan serta langsung oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retrebusi Daerah Kota Banjarbaru dikarenakan masyarakat di Kota Banjarbaru juga sudah paham akan fungsi PBB dan apa yang menjadi kewajiban masyarakat setiap tahunnya atau bangunan rumah dan tanah yang dimilikinya diwajibkan membayar pajak setiap tahunnya kepada Pemerintah Daerah sama halnya dengan kesadaran tidak sampainya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) yang belum diberikan secara elektronik oleh Pemerintah Kota Banjarbaru selain itu kondisi ekonomi yang belum stabil di masyarakat sehingga membuat wajib pajak PBB melakukan penunggakan pajak yang membuat piutang PBB menjadi meningkat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Faridah et al., (2023) Sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mempelajari norma, nilai, peran, serta berbagai persyaratan lain yang diperlukan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan sosial. Manfaat sosialisasi dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua tahap. Bagi individu, sosialisasi berfungsi sebagai panduan untuk belajar memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, termasuk nilai, norma, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan hasil jawaban responden pada pengisian kuesioner penelitian untuk pertanyaan variabel Sosialisasi dijawab dengan nilai rata – rata setuju atas pertanyaan Pemerintah daerah sudah melakukan penyuluhan Pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru. Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru dengan baik. Pajak PPB-P2 Kota Banjarbaru disosialisasikan diberbagai media informasi. Posisi penelitian mendukung Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru karena nilai signifikan lebih besar dari  $0,924 > 0,05$ .

Hasil penelitian menunjukan bahwa Insentif berpengaruh signifikan dengan arah negatif Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru, Insentif harus terus diberikan Pemerintah Kota Banjarbaru selain penghapusan denda juga adanya penghapusan piutang yang sudah tertunggak beberapa tahun hal ini merupakan upaya efektif untuk penurunan piutang PBB di Kota Banjarbaru disaat masyarakat sudah pasrah dan tidak mampu lagi melakukan pelunasan PBBnya dengan adanya relaksasi pemberian insentif pajak maka wajib pajak yang sudah tertunggak akan kembali terbuka niatnya untuk melakukan pelunasan piutang PBBnya sehingga dengan ditingkatkannya pemberian insentif pajak maka piutang PBB di Kota Banjarbaru akan menurun.

Temuan penelitian sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut (Gustiarama, 2022; Selvi & Ramdhan, 2020; Sitohang & Sinabutar, 2020) **Insentif pajak didefinisikan sebagai bentuk pengecualian dari peneanaan pajak, pembebasan pajak tertentu, pengurangan atau kredit pajak, penerapan tarif khusus, atau penangguhan kewajiban pajak.** Berdasarkan hasil jawaban responden pada pengisian kuesioner penelitian untuk pertanyaan variable Insentif dijawab dengan nilai rata–rata setuju atas pertanyaan Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki peraturan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Kota Banjarbaru memberikan pengurangan pajak dengan adil dan Wajib Pajak PBB-P2 memiliki dampak yang baik dari peraturan pengurangan pajak yang dibuat. Posisi penelitian mendukung Insentif berpengaruh signifikan dengan arah negatif Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru karena nilai signifikan lebih kecil dari  $0,039 > 0,05$ .

### **Variabel Insentif Berpengaruh Dominan terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru**

Insentif merupakan satu satunya variabel yang berpengaruh negatif terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penelitian ini, temuan penelitian ini tidak ada kesamaan temuan hasil dengan penelitian terdahulu karena analisa variabel yang berpengaruh dominan pada penelitian tidak dilakukan namun sejalan dengan teori yang dikemukakan Menurut Selvi & Ramdhan, (2020) mendefinisikan insentif pajak sebagai suatu pengecualian peneanaan pajak, pembebasan pajak, pengurangan atau kredit pajak tertentu, tarif khusus atau kewajiban pajak yang di tangguhkan.

Insentif merupakan salah satu variabel yang sangat berpengaruh negatif terhadap Piutang Daerah semakin banyaknya program pemberian Insentif bagi wajib pajak PBB maka semakin menurun juga piutang daerah PBB di Kota Banjarbaru, hal ini harus terus dilakukan pada hari dan bulan–bulan khusus setiap tahunnya sehingga wajib pajak yang memiliki banyak piutang bisa melakukan pelunasan PBB.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah: Kesadaran, Sosialisasi dan Insentif berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru. Kesadaran dan Sosialisasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru sedangkan Insentif berpengaruh signifikan secara parsial dengan arah negatif Terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru dan Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Piutang Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru adalah Insentif (X3).

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, N., & Lahaya, I. A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (Jiam)*, 6(4).
- Aprilia, E. (2021). *Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Sidoarjo*. Stie Perbanas Surabaya.
- Aqwam, A. K. M. (2022). *Hubungan Tindakan Tidak Aman terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja pada Pekerja Welder di PT Lintech Seaside Facility*. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Ardiansyah, F. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Survey pada Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung Ii Soreang)*. Universitas Widyatama.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. (No Title)*.
- Arum, H. P., & Zulaikha, Z. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Awaloedin, D. T., Indriyanto, E., & Meldiyani, L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan). *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 217–233. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v5i2.950>
- Dewi, P. R. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Efektifitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Insentif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Badung Utara*. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Dianartini, K. D., & Diatmika, I. P. G. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan, Sikap Wajib Pajak dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha)*, 12(1), 935–947.

- Dianawati Wijaya, D., & Setyadi, Y. B. (2019). *Model Sosialisasi Nilai-Nilai Persatuan Indonesia dengan Menggunakan Strategi Reading Aloud Kombinasi Card Sort pada Pemuda Muhammadiyah dan Nasyyiatul Aisyiyah Cabang Bendosari Daerah Sukoharjo Tahun 2019*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Eko Listiwikono, E. (2022). Implementation of Strengthening State Science Knowledge Using Camp Study Methods on PPKN Students of PGRI Banyuwangi University. *Gandrung: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Faridah, F., Wijayanti, Z., Al Hidayat, R., Putri, S., & Hestiana, A. (2023). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu Sosialisasikan Layanan Perizinan dalam Rangkaian Pengenalan Kampus dan Program Studi (PKPS) Stia Bengkulu. *Jurnal Semarak Mengabdi*, 2(1), 15–20.
- Gustiarama, F. D. (2022). *Pengaruh Pepsepsi Pengetahuan Perpajakan, Insentif Pajak PPH 21, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Universitas Komputer Indonesia.
- Harini, G., Syamra, Y., & Setiawan, P. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Pajak, dan Cash Flow terhadap Konservatisme Akuntansi. *Manajemen dan Kewirausahaan*, 11(1), 10–23.
- Huda, I. U., & Karsudjono, A. J. (2022). Perkembangan Aspek Sikap Sosial dan Adat Istiadat Masyarakat Adat Dayak Meratus di Era Revolusi Industri 4.0. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(03), 605–628. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1097>
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 3(1), 1–8.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(2), 276–284.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep Sistem dan Implementasi*.
- Sari, S. R. K., & Siswanto, A. (2022). Pengaruh Administrasi Perpajakan, Pelayanan pada Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun). *Jurnal Ekomaks Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 11(2), 192–197. <https://doi.org/10.33319/jeko.v11i2.128>
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100.
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Isentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 13(3). <https://doi.org/10.58303/jeko.v13i3.2391>
- Wardati, A. R., Iskandar, I., & Pattisahusiwa, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (Jiam)*, 7(3), 6.



**This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)**

---